

STRATEGI KEBUDAYAAN PEMBANGUNAN KEBERAGAMAAN DI INDONESIA: Mempertegas Kontribusi Kearifan Budaya Lokal Dalam Masyarakat Berbhinneka

Ismet Sari

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara

ismetsari@uinsu.ac.id

Abstrak

Masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki latar belakang kebudayaan yang beragam, jelas memerlukan kerangka acuan untuk dijadikan pegangan dalam pergaulan nasional masa kini. Oleh karena itu, nilai-nilai tradisional yang mengandung kearifan, persamaan, multikultural, dan bisa dijadikan pegangan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia di mana pun tempat tinggalnya, perlu digali dan diteliti kemudian ditawarkan sebagai alternatif yang baik untuk pengembangan dan pembangunan kehidupan sosial keagamaan yang baru dan serasi. Dalam sejarah bangsa-bangsa ketika menghadapi kerumitan sosial, ekonomi, politik, konflik agama, dan sebagainya, kerap menemukan solusi dengan memetik kearifan tradisi lokal. Nilai kearifan lokal akan memiliki makna apabila tetap menjadi rujukan dalam mengatasi setiap dinamika kehidupan sosial, lebih-lebih lagi dalam menyikapi berbagai perbedaan yang rentan menimbulkan konflik. Keberadaan kearifan budaya lokal justru akan diuji ditengah-tengah kehidupan sosial yang dinamis. Di situlah sebuah nilai akan dapat dirasakan.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Pembangunan, Strategi Budaya

Abstract

Indonesian society that is plural and has a diverse cultural background, clearly requires a framework of reference to be used as a guideline in today's national relations. Therefore, traditional values that contain wisdom, equality, multiculturalism, and can be shared with all Indonesian people wherever they live, need to be explored and researched and then offered as a good alternative for the development and development of a new religious social life and harmonious. In the history of nations when faced with the complexity of social, economic, political, religious conflicts, etc., often find solutions by reaping the wisdom of local traditions. The value of local wisdom will have meaning if it continues to be a reference in overcoming every dynamic of social life, moreover in addressing various differences that are prone to conflict. The existence of local cultural wisdom will be tested in the midst of dynamic social life. That's where a value will be felt.

Keywords: Local Wisdom, Development, Strategy of Culture

Pendahuluan

Pertemuan antarbudaya dan kehidupan sosial kerap menimbulkan konflik di satu sisi dan upaya untuk mencari kompromi sebagai jalan keluar di sisi lain. Kenyataan ini tak

mengecualikan kehidupan kita di masa lalu, saat ini dan bahkan juga akan datang. Interaksi dengan yang lain dalam hubungannya dengan budaya, kehidupan sosial bahkan tata politik dan sistem ekonomi adalah sesuatu yang niscaya. Tidak ada satu komunitas masyarakat yang *immune* dari interaksi dengan yang lain.

Karena kenyataan itu, kemajemukan dalam arti luas adalah satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Dalam ranah teori politik, para ahli mencoba mencari satu sistem yang mampu mengelola perbedaan secara adil dan damai. Sementara dalam wilayah kebudayaan, interaksi dengan yang lain secara alamiah akan menghasilkan satu sintesis budaya dan praktek sosial yang merupakan perpaduan dari ragam budaya yang berlangsung dalam sebuah ruang publik yang kondusif dan terbuka (Sunaryo, 2019:176).

Ruang publik yang kondusif dan terbuka bagi ragam pandangan, aliran dan kebudayaan yang dianut warga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menegosiasi perbedaan secara damai dan adil. Negara cukup menjamin bahwa ruang publik yang ada itu berjalan sesuai dengan prinsip yang merangkul semua, setara dan anti represi.

Ruang publik yang kondusif, terbuka dan dialektis, memang tidak menjamin bahwa satu pandangan atau aliran akan bertahan terus. Negosiasi budaya dan pandangan yang ada di masyarakat mengisyaratkan kejatuhan yang satu dan menaikkan yang lain. Ini adalah sesuatu yang lazim kita temukan bila kita memahami kebudayaan dan kehidupan sosial sebagai sesuatu yang terus hidup dan berjalan (Mujiburrahman, 2008).

Dengan demikian, negosiasi antar budaya dan pandangan adalah sesuatu yang lazim kita dapatkan dalam setiap masyarakat. Dalam perpaduan Kristen dan Romawi (Eropa) misalnya, ada satu ungkapan *ma tanashsharat al-rum wa lakin taranwamat al-nashara* (bukan orang Romawi yang menjadi Kristen, melainkan orang Kristenyang menjadi Romawi). Begitu juga dengan Islam Indonesia, ia adalah sebuah dinamika unik di mana Islam yang muncul akan berbeda dengan Islam yang ada di belahan bumi lain dan dengan kebudayaan yang juga berbeda.

Kearifan Budaya Lokal: Ruang Lingkup Defenisi

Secara etimologis, *kearifan* berasal dari kata dasar arif yang dalam bahasa Indonesia berarti 'berilmu, bijak'. Kata ini berasal dari kata Arab *'arafa*, yang berarti mengetahui, memiliki pengetahuan', sedangkan subjeknya disebut sebagai *'arif*. Namun dalam penggunaannya yang lazim, kata ini biasanya dibedakan dari kata *'alima* (kata kerja) *'alim* (pelaku), yang masing-masing juga berarti mengetahui' dan 'orang yang memiliki pengetahuan'. Perbedaannya ialah kata *'arafa* biasanya digunakan untuk merujuk pada proses mengetahui yang disadari atas pertimbangan-pertimbangan yang mendalam dan berdimensi jangka panjang dibandingkan

dengan proses mengetahui dalam kata *'alama*. Itulah sebabnya dalam tradisi kesufian (tasawuf), kata yang lebih sering digunakan untuk menggambarkan pengetahuan yang tertinggi dalam jenjang kesufian adalah *ma'rifah*, bukan *'ilm*.

Karena itu, tidak keliru bila kata *kearifan* itu difahami bukan hanya sekedar 'berpengetahuan' atau 'berilmu', tetapi juga bijaksana (Ingg. *Wise, wisdom*; Ar. *Hakim, hikmah*). Pengetahuan yang dilandasi kebijaksanaan ini umumnya bukan berkaitan dengan kebenaran teoritis (*truth*), melainkan ketepatan moral dan tindakan (*rightness*) (Ayatrohaedi, 1986:18-19,40-41).

Sejalan dengan pengertian etimologis di atas, kearifan budaya lokal dipahami sebagai nilai-nilai yang dijadikan sebagai acuan, pedoman atau aturan oleh komunitas budaya setempat dalam keseluruhan proses interaksi mereka (James Dananjaja, 1986), meliputi (1) interaksi antara manusia dan hal-hal yang ghaib, seperti Tuhan dan roh-roh; (2) interaksi antar sesama manusia, seperti perkawinan, pergaulan hidup sehari-hari dan tata pemerintahan; (3) interaksi antar manusia dan lingkungannya, baik dunia alam, binatang maupun tumbuhan, yang umumnya mengarah pada upaya konservasi lingkungan.

Kearifan lokal merupakan salah satu produk kebudayaan. Sebagai produk kebudayaan, kearifan lokal lahir karena kebutuhan akan nilai, norma dan aturan yang menjadi model untuk (*model for*) melakukan suatu tindakan. Kearifan lokal merupakan salah satu sumber pengetahuan (kebudayaan) masyarakat, ada dalam tradisi dan sejarah, dalam pendidikan formal dan informal, seni, agama dan interpretasi kreatif lainnya. Diskursus kebudayaan memungkinkan pertukaran secara terus menerus segala macam ide dan penafsirannya yang meniscayakan tersedianya referensi untuk komunikasi dan identifikasi diri. Ketika gelombang modernisasi, globalisasi melanda seluruh bagian dunia, maka referensi yang berupa nilai, symbol, pemikiran mengalami penilaian ulang. Ada pranata yang tetap bertahan (stabil), tetapi tidak sedikit yang berubah, sedang membentuk dan dibentuk oleh proses sosial (Niel Mulder, 1999:204).

Menurut Faqih, asumsi-asumsi modernisasi yang dominatif dan positivistik telah mempengaruhi pola pengambilan kebijakan pembangunan selama ini. Asumsi ini beranggapan bahwa upaya pembangunan merupakan suatu proses dari tradisi menuju modern. Dengan kata lain, "*tradisi*" dilihat sebagai "*masalah*" yang harus dipecahkan. Untuk mencegah munculnya konflik akibat adanya perbedaan itu, Faqih mengusulkan perlunya dilakukan transformasi budaya yakni proses menciptakan hubungan yang lebih demokratis, tidak saja antara masyarakat adat dengan dunia luar tetapi juga di antara mereka sendiri (Koentjaraningrat, 1987:80).

Dengan menyoroti perubahan kependudukan dan perubahan sosial masyarakat di abad sekarang ini, bahwa tantangan yang muncul sebagai akibat dari proses globalisasi memang luas dan banyak. Dan disamping adanya peningkatan kesejahteraan serta pudarnya batas politik dan ekonomi dalam hubungan antara bangsa, muncul pula bentuk penjajahan baru di bidang iptek. Revolusi yang terjadi di bidang komunikasi dan transformasi mengubah pula perilaku masyarakat tidak hanya yang dari kota tetapi juga dari lingkungan pedesaan. Oleh karena itu, jika kita ingin *survive* ke abad sekarang (milenium ke 3) sebagai bangsa yang modern, tetapi tetap berkepribadian Indonesia, kita harus bertanya apa kepribadian Indonesia itu. Bukankah kepribadian Indonesia itu dapat kita temukan akar-akarnya dalam masyarakat tradisional.

Dalam pembatasan ini, maka pengertian kearifan budaya lokal seperti didefinisikan Endang Turmudi menjadi relevan dengan penelitian ini, yaitu kearifan budaya lokal sebagai sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah sosial atau hubungan antar berbagai kelompok sosial kebudayaan. Dengan kata lain, kearifan budaya lokal adalah sistem pemecahan masalah atau pengaturan hubungan dan interaksi sosial untuk menciptakan harmoni. Contohnya adalah konsep *Pela Gandong* di Maluku dan *Subak* di Bali (Endang Turmudi, 2005:7-8). Namun demikian, ada pula kemungkinan bahwa nilai-nilai kearifan tersebut belum terlembaga, tetapi masih tersimpan, misalnya dalam bentuk folklor (Budiaman, 1979:13). Dalam studi kebudayaan bisa dikatakan, bahwa, folklor merupakan media pengemasan nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam suatu komunitas budaya, yang melaluinya nilai-nilai kearifan disosialisasikan dan ditransformasikan antargenerasi (Budiaman, 1979:14-15).

Manusia dan Dinamika Kebudayaan

Di dalam setiap masyarakat terdapat apa yang dinamakan pola-pola perilaku atau *patterns of behavior*. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi. Kecuali terpengaruh oleh tindakan bersama tadi, maka pola-pola perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya.

Dalam mengatur hubungan antar manusia, kebudayaan dinamakan pula struktur normatif atau menurut istilah Ralph Linton "*designs for living*" (garis-garis atau petunjuk dalam hidup). Artinya kebudayaan adalah suatu garis-garis pokok tentang perilaku atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dilarang dan lain-lain. Misalnya, unsur yang menyangkut pengendalian pengetahuan

tentang kepercayaan, seperti harus mengadakan upacara adat pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan dan lainnya (Soerjono Soekanto, 1983:199).

Menurut Abdon Nababan, dengan masuknya sistem pemerintahan yang baru di tingkat desa dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa, yang sesuai dengan UU No. 5 tahun 1979, semakin menjauhkan masyarakat dari adat dan budayanya. Tradisi adat yang dulu sangat efektif mengatur penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan serta menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, menjadi kehilangan kekuatan. Sementara itu sistem dan peraturan-peraturan baru dari pemerintah belum bisa diterima dan ditegakkan dengan efektif. Kemudian di beberapa daerah terlihat adanya kekosongan hukum yang berakibat langsung pada perusakan lingkungan. Misalnya, penebangan hutan tidak resmi untuk tujuan komersial atau istilah sekarang yang sedang marak dibicarakan adalah *illegal logging*. Selain itu penggunaan bom dan racun sianida dalam penangkapan ikan yang melibatkan masyarakat lokal (Abdon Nababan, 1995:429).

Setiap kebudayaan (*culture*) memiliki cara-cara hidup sendiri, terutama dalam melakukan tindakan-tindakan sosial warganya, oleh karena perbedaan kebutuhan, sistem kepercayaan, warisan sosial, dan lingkungan fisik. Sehingga antar kultur itu menjadi berbeda satu sama lain (Clifford Geertz, 1983:206). Kebudayaan sendiri memiliki banyak pengertian. Di antara pengertian itu adalah mengangkat unsur-unsur: cara berpikir, Merasa, mempercayai, dan menguasai ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Kebudayaan menimbulkan kepentingan-kepentingan, menyediakan cara-cara mengembangkan diri dan seterusnya. Kebudayaan mempunyai wujud dan struktur (Clifford Geertz, 1983:206).

Seorang individu yang lahir di tengah komunitas tidak membangun dan mencipta kulturenya sendiri, tetapi ia dibentuk oleh kultur lingkungannya. Kekuatan yang mempengaruhi manusia bukan oleh kemampuan menciptakan pemikiran-pemikiran baru, tetapi lebih dipengaruhi oleh kemampuan mengadopsi, mentransfer dan menjalankan tradisi-tradisi (Craig J. Calchoon, 1976:12). Kebudayaan berfungsi sebagai 'mekanisme kontrol' bagi perilaku dan tindakan manusia. Hampir semua unsur tindakan kini mengalami transformasi. Sebagian unsur kebudayaan gugur, karena tidak diperlukan lagi dan yang lainnya berlanjut terus. Unsur yang gugur kadangkala muncul kembali dengan konsep yang baru dan diinterpretasi secara baru (Clifford Geertz, 1983).

Kebudayaan dipandang sebagai manifestasi kehidupan setiap orang atau kelompok orang yang selalu mengubah alam. Kegiatan manusia memperlakukan lingkungan alamiahnya, itulah kebudayaan. Kebudayaan merupakan usaha manusia, perjuangan setiap orang atau kelompok dalam menentukan hari depannya. Kebudayaan merupakan aktifitas yang dapat

diarahkan atau direncanakan (Van Peursen, 1976:10-11). Oleh sebab itu dituntut adanya kemampuan, kreativitas, dan penemuan-penemuan baru. Manusia tidak hanya membiarkan diri dalam kehidupan lama melainkan dituntut mencari jalan baru dalam mencapai kehidupan yang lebih manusiawi. Dasar dan arah yang dituju dalam perencanaan kebudayaan adalah manusia sendiri sehingga humanisasi menjadi kerangka dasar dalam strategi kebudayaan (Ali Moertop, 1978:12). Dengan melihat kearifan lokal sebagai bentuk kebudayaan maka ia akan mengalami *reinforcement* secara terus menerus menjadi yang lebih baik. Ali Moertopo menyatakan, humanisasi merupakan ideal proses dan tujuan kebudayaan. Oleh karena itu maka kearifan lokal sebagai manifestasi kebudayaan yang terjadi dengan penguatan-penguatan dalam kehidupannya menunjukkan sebagai salah satu bentuk humanisasi manusia dalam berkebudayaan. Artinya sebagai manifestasi humanitas manusia, kearifan lokal dianggap baik sehingga ia mengalami penguatan secara terus-menerus tetapi, apakah ia akan tetap menjadi dirinya tanpa perubahan, benturan kebudayaan akan menjawabnya.

Dinamika kebudayaan merupakan suatu hal yang niscaya. Hal ini tidak lepas dari aktivitas manusia dengan peran akalunya. Dinamika atau perubahan kebudayaan dapat terjadi karena berbagai hal. Satu hal yang tidak dapat dihindari bahwa perkembangan dan perubahan akan selalu terjadi. Di kalangan antropolog ada tiga pola yang dianggap paling penting berkaitan dengan masalah perubahan kebudayaan: *evolusi*, *difusi*, dan *akulturasi*. Landasan dari semua itu adalah penemuan atau inovasi (Robert H. Lauer, 1993:387). Perubahan pada budaya nusantara sendiri akan merupakan suatu wacana yang maha luas akibat pengertian dan ranah budaya nusantara sendiri yang sangat luas. Dalam perjalanannya, budaya nusantara, baik yang masuk kawasan istana maupun di luar istana, tidak statis, ia bergerak sesuai dengan perubahan dan perkembangan jaman. Dengan adanya kontak budaya, difusi, asimilasi, akulturasi sebagaimana dikatakan sebelumnya, nampak bahwa perubahan budaya di masyarakat akan cukup signifikan.

Konservasi dan Revitalisasi Kearifan Budaya Lokal

Kenyataan secara niscaya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, dihuni oleh beragam budaya (*multi cultural*), suku (*multi ethnic*) dan agama (*multi religion*) yang keberadaannya diakui oleh negara dan menjadi anutan bagi umat masing-masing dalam melakukan aktivitas kehidupan sosial keagamaan. Kemajemukan tersebut adalah kekayaan dan modal sosial (*social capital*) bangsa serta merupakan sumber kearifan yang luhur yang dapat menjadi perekat hubungan sosial sekaligus energi pengikat yang mempersatukan berbagai elemen masyarakat yang heterogen (Nur Ahmad Fadhil Lubis, 2008). Dalam kurun beberapa waktu terakhir,

terutama sejak bergulirnya era reformasi di Indonesia pada 1998, konsep-konsep kearifan berbasis budaya lokal semakin banyak menjadi bahan perbincangan publik maupun objek kajian dan penelitian. Setidaknya ada dua hal yang dapat dikatakan melatarbelakangi semakin tingginya minat dan perhatian orang untuk mengkaji dan menggali kembali konsep kearifan budaya lokal. Pertama, meningkatnya kasus-kasus konflik antar berbagai kelompok sosial budaya di Indonesia. Kedua, meningkatnya –seiring dengan lahirnya reformasi dan era otonomi daerah- tuntutan akan pengakuan terhadap entitas budaya lokal yang selama zaman Orde Baru cenderung terpinggirkan.

Berbagai kasus konflik sosial yang terjadi itu, dalam pandangan sebagian orang, mencerminkan hilangnya suatu tatanan nilai atau kelembagaan yang sebelumnya memiliki fungsi integrasi sosial. Apalagi dalam beberapa kasus, konflik itu terjadi demikian luar biasa, baik dilihat dari segi cakupan elemen kelompok masyarakat yang terlibat maupun dari segi dampak kerusakan yang ditimbulkan. Beberapa di antara berbagai kasus konflik yang memiliki dampak kerusakan fisik, sosial maupun psikologis yang sangat besar adalah kasus konflik antara komunitas Muslim dan Kristen di Ambon, Maluku dan kasus konflik antar warga Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan, dan kasus konflik sosial di Poso. Itulah sebabnya ketika meletus konflik sosial yang dahsyat di Ambon, pertanyaan yang muncul adalah, “di mana kearifan tradisi dan budaya *Pela Gandong* yang dibanggakan masyarakat Ambon? (Anik Farida, 2007).

Adapun tuntutan akan pengakuan atas eksistensi dan otonomi budaya-budaya lokal, yang merupakan salah satu buah dari era reformasi, merupakan kritik terhadap konsep dan strategi pembangunan kebudayaan pada masa lalu –baik pada masa rezim Orde Lama Sukarno maupun Orde Baru Suharto yang disebut sejarahwan Taufik Abdullah sebagai periode ‘negara serakah’ (*greedy state*)(Taufik Abdullah, 2006:132), yang cenderung monolitik dan serba pusat. Tidak hanya itu, pembangunan budaya nasional pada era Orde Baru dipandang oleh banyak pihak lebih merupakan pembangunan dominasi budaya Jawa, atau Jawanisasi, atas budaya suku-suku bangsa yang lain. Penggunaan istilah-istilah sansekerta secara berlebihan dalam berbagai nomenklatur politik maupun penyebutan nama-nama tempat dan bangunan, serta nama-nama penghargaan, menjadi indikasi transparan upaya ‘Jawanisasi’, atau paling tidak kebijakan ‘Jawa-sentris’ pemerintah Orde Baru.

Berbagai tuntutan menyangkut pengakuan terhadap hak lain dalam bentuk wacana multikulturalisme, yakni suatu perspektif pengelolaan budaya yang lebih memberi penghargaan terhadap perbedaan dan keunikan budaya dari tiap-tiap komunitas (Parsudi Suparlan, 2002). Pihak pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Agama RI, telah mengambil

inisiatif ke arah penggunaan perspektif multikulturalisme ini dalam upaya pengembangan kehidupan sosial keagamaan. Menurut Muhammad Maftuh Basyuni, sejak tahun 2003, telah diselenggarakan dialog dalam rangka pengembangan wawasan multikultural di kalangan pemuka agama di berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

Melalui kegiatan dialog tersebut telah dapat diidentifikasi sejumlah kearifan budaya lokal yang berperan dalam membina interaksi kehidupan sosial keagamaan yang harmonis dan konstruktif di antara warga masyarakat yang memeluk beraneka ragam agama, lingkungan sosial dan budaya (Muhammad Maftuh Basyuni, 2006:15-16).

Masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki latar belakang kebudayaan yang beragam, jelas memerlukan kerangka acuan untuk dijadikan pegangan dalam pergaulan nasional masa kini. Oleh karena itu, nilai-nilai tradisional yang mengandung kearifan, persamaan, multikultural, dan bisa dijadikan pegangan bersama bagi seluruh masyarakat Indonesia di mana pun tempat tinggalnya, perlu digali dan diteliti kemudian ditawarkan sebagai alternatif yang baik untuk perkembangan kehidupan sosial keagamaan yang baru dan serasi. Penawaran alternatif itu, penting, karena tidaklah mudah untuk memaksakan nilai-nilai yang dianggap baik ke dalam pergaulan nasional bila tidak dengan mengenal latar belakang kultural masyarakat yang beragam.

Banyak pengetahuan tradisional yang menjadi sumber kearifan sosial masa sekarang. Dalam sejarah bangsa-bangsa ketika menghadapi kerumitan sosial, ekonomi, politik, konflik agama, dan sebagainya, yang menemukan solusi dengan memetik kearifan tradisi lokal. Nilai kearifan lokal akan memiliki makna apabila tetap menjadi rujukan dalam mengatasi setiap dinamika kehidupan sosial, lebih-lebih lagi dalam menyikapi berbagai perbedaan yang rentan menimbulkan konflik. Keberadaan kearifan budaya lokal justru akan diuji ditengah-tengah kehidupan sosial yang dinamis. Di situlah sebuah nilai akan dapat dirasakan.

Ada banyak peluang untuk pengembangan wacana kearifan lokal Nusantara. Maka kekayaan kearifan budaya lokal menjadi lahan yang cukup subur untuk digali, diwacanakan dan dianalisis mengingat faktor perkembangan budaya terjadi dengan begitu pesatnya. Dalam kurun satu dasawarsa terakhir, ada sejumlah penelitian mengenai kearifan lokal yang dilakukan di sejumlah tempat. Misalnya, Mumfingati, (2004), di lingkungan masyarakat Samin, Blora, Jawa Tengah. Sukari, (2004), di lingkungan masyarakat Tengger, Pasuruan Jawa Timur. Herawati, (2004) di lingkungan masyarakat Using, Banyuwangi, Jawa Timur. Sumintarsih, (2005), di lingkungan masyarakat nelayan Madura dan Suyami, (2005), di lingkungan masyarakat nelayan Jepara, Jawa Tengah. Afif H.M., (2007) di lingkungan masyarakat etnik Melayu dan Jawa di kota Pekan Baru. Marzani Anwar, (2007) di lingkungan masyarakat Jambi,

Moh. Zahid, (2007) pada lingkungan masyarakat Lampung. Dan Rudy Harisyah Alam, (2007), di lingkungan masyarakat Betawi.

Kearifan Budaya Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa memiliki lokus sosial dan budaya masing-masing. Komunitas etnik menjalin hubungan dalam perdamaian, persaingan bahkan pertentangan. Relasi sosial yang demikian ini melahirkan pranata dan lembaga yang mengikat masing-masing kelompok atau semua kelompok untuk hidup secara damai dan harmonis. Pengetahuan kebudayaan (*local knowledge*) seperti ini dipahami secara baik dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Kemajemukan kebudayaan tersebut menjadi kekayaan dan modal bagi tumbuh kembangnya demokrasi di Indonesia. Namun, kemajemukan juga menjadi potensi konflik sosial antarmasyarakat dan umat beragama yang dapat mengancam negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi jika kemajemukan tersebut tidak dikelola dengan baik.

Kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat bangsa mengalami pemilahan (*segregasi*) secara terkonsolidasi, termasuk masyarakat Indonesia, cenderung mengembangkan identitas kelompok yang kuat dan menciptakan kohesi kelompok yang kokoh. Dalam kelompok sosial yang demikian, kesadaran konflik cenderung tinggi. Akibatnya, ketika sebuah kelompok: apakah kelompok keagamaan, etnik, budaya maupun politik terlibat konflik dengan kelompok lain maka intensitas konflik tersebut cenderung tinggi. Individu-individu dalam masyarakat dengan konfigurasi *segregasi* sosial yang terkonsolidasi cenderung lebih mudah melakukan subjektivitas konflik. Konflik yang sebenarnya terkait dengan ekonomi maupun kriminal (*objective conflict*) berkembang menjadi konflik etnik atau agama (*subjective conflict*), baik konflik yang melibatkan antaragama maupun intern umat beragama. Dalam sudut pandang yang demikian maka dapat dipahami mengapa di Indonesia persoalan yang sebenarnya *sepele* dapat dengan mudah menjadi konflik yang meluas dan berkembang menjadi konflik etnoreligius sebagaimana peristiwa kerusuhan sosial sejak 1995 di NTT, Situbondo dan Tasikmalaya (1996), Pekalongan, Temanggung, Banjarnegara, Sanggaoleto (1997), juga Ambon dan Sampit (1999), serta terakhir kerusuhan Sampang (2012). Konflik ini tidak hanya merusak harta dan benda tetapi merusak seluruh tatanan sosial, pranata dan kerukunan yang ada (Lempedely, 2007).

Resolusi konflik yang dilakukan selama ini cenderung menggunakan pendekatan *top down*, penyelesaian dari atas. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan mengambil peran menyelesaikan konflik tersebut. Tentu saja bagi pemerintah, kebijakan yang cepat dan tepat lebih memberikan jaminan bagi mereka yang terlibat konflik untuk menghentikan

pertentangan yang disertai kekerasan tersebut. Cara yang ditempuh juga dengan cara pemaksaan damai (*peace making*), kemudian dilanjutkan dengan membangun perdamaian (*peace building*) seperti yang dilakukan pemerintah dengan perundingan Malino I dan Malino II. Ketika perdamaian sudah berjalan semua pihak termasuk pemerintah melakukan pencegahan terjadinya konflik kembali (*peace keeping*). Strategi ini belum cukup untuk menjamin terwujudnya perdamaian dalam jangka waktu yang lama.

Salah satu cara yang ampuh untuk pencegahan dan pemeliharaan perdamaian adalah dengan memfungsikan pranata-pranata sosial yang ada, atau dibentuk dan disepakati pranata sosial baru. Pranata sosial itu dapat berbentuk norma, nilai, kepercayaan dan aturan-aturan yang disepakati bersama dan diakui. Pranata lama, sebagaimana yang telah dianggap sebagai kearifan setempat (*local wisdom*). Kegeniusan masyarakat lokal (*local genius*) atau pengetahuan setempat (*local knowledge*) seperti *pelagandong* di Maluku, *dalihan na tolu* di Sumatera Utara, *tigo tungku sajarangan* di Sumatera Barat, *Subak* di Bali dan *Slametan* di Jawa. Jika pranata sosial lama sudah tidak berfungsi maka perlu diciptakan pranata baru yang disepakati dan diakui bersama untuk menciptakan, membangun dan memelihara perdamaian sebagaimana Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Atau seperti yang dilakukan oleh masyarakat Wayame di Ambon untuk memelihara kerukunan dan kedamaian desanya dengan membuat pranata baru (Rusmin Tumanggor, 2004:207-208).

Kearifan budaya lokal yang merupakan keyakinan tradisional mengandung sejumlah besar data empiris yang berhubungan dengan fenomena, proses dan sejarah perubahan lingkungan sehingga membawa implikasi bahwa sistem pengetahuan tradisional dapat memberikan gambaran informasi yang berguna bagi perencanaan dan proses pembangunan. Kearifan tradisional dipandang sebagai kearifan budaya lokal (*indigenous knoweledge*), dan merupakan sumber informasi empiris dan pengetahuan penting yang dapat ditingkatkan untuk melengkapi dan memperkaya keseluruhan pemahaman ilmiah. Kearifan budaya atau masyarakat merupakan kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu etnis, yang merupakan hasil pengamatan dalam kurun waktu yang panjang. Kearifan budaya lokal tersebut banyak berisikan gambaran tentang anggapan masyarakat yang bersangkutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kualitas lingkungan manusia, serta hubungan-hubungan manusia dengan lingkungan alamnya.

Pembangunan dan pengembangan masyarakat atau bangsa sering disamakan dengan *development*. Pengembangan adalah kelanjutan dari yang sudah ada, sedangkan pembangunan berasal dari ketidakadaan menjadi ada sebagaimana yang diinginkan. Lucy Mair menyebutkan bahwa pembangunan mengacu pada proses atau gerakan bersama ke arah keadaan yang seharusnya sudah dicapai seperti bangsa lain (Widiyanto, Bambang, & Iwan Meulia Pirous, 2009:31). Pembangunan adalah sebuah ideologi perubahan sosial yang direncanakan melalui strategi modernisasi. Dimulai dengan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi yang bias bantuan. Masyarakat dan negara-negara berkembang diasumsikan tidak mengerti harus bagaimana mereka membangun dirinya. Bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumberdaya serta dana mengalir ke negara-negara berkembang. Celakanya, banyak negara-negara yang dibantu malah menjadi tergantung kepada negara donor, alih-alih dapat mandiri dan tinggal landas sebagaimana pengalaman Indonesia.

Kebijakan pembangunan ekonomi negara-negara berkembang telah berubah secara drastis sejak 1980-an. Hampir semua negara berkembang mengubah kebijakannya ke arah liberalisasi untuk memperoleh kepercayaan pasar. Nasionalisme ekonomi menjadi tersingkir, peran negara juga menjadi semakin lemah dan pembangunan yang bercorak sosialis menjadi berhenti. Dalam kondisi yang demikian, institusi lokal menjadi mati suri dan tidak berdaya. Kritik terhadap pendekatan pembangunan dengan model modernisasi dilakukan oleh banyak pihak. Antonio Gramsci, misalnya, tentang hegemoni ideologi pasar (Muhadi Sugiono, 1999), bantuan yang mematikan (Brigitte Erler, 1988), dan teori yang mematikan, dan teori pembangunan desa, *“Rural Development: Putting the Last First”* (Robert Chambers, 1987), yang berarti membangun dengan “ilmu rakyat”, membangun dengan berguru kepada rakyat. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah strategi pembangunan berbasis kebudayaan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Bagaimana peran pemerintah atau pihak-pihak yang memberikan bantuan. Mereka adalah fasilitator, pendamping dan bekerja bersama-sama dengan rakyat.

Merujuk pada beberapa pengalaman penanggulangan konflik etnoreligius menunjukkan bahwa pranata sosial yang selama ini mengalami mati suri ternyata masih dapat dibangun kembali, direvitalisasi untuk mengelola potensi konflik dan integrasi. Salah satu strategi budaya yang dipergunakan adalah melalui *Participatory Action Research* atau Riset Aksi Partisipatif. Kegiatan riset ini sesungguhnya sebuah model, pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat. Bedanya, pemberdayaan masyarakat masih kuat nuansa developmentalisme sedangkan riset aksi partisipatif berangkat dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Peneliti yang datang ke wilayah penelitian tidak membawa rencana yang standar

untuk melakukan perubahan. Peneliti bersama-sama dengan masyarakat setempat melakukan pemetaan (*mapping*) permasalahan yang dihadapi. Hasil pemetaan adalah identifikasi berbagai kearifan lokal (*local wisdom*). Masyarakat bersama peneliti PAR melakukan klasifikasi kearifan budaya lokal dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik. Setelah terhimpun beberapa kearifan budaya lokal, masyarakat dan peneliti bersama-sama melakukan analisis kearifan budaya lokal yang masih fungsional dan yang tidak. Apa sebab pranata dan lembaga yang di dalamnya terkandung kearifan lokal tidak berfungsi lagi dalam kehidupan sosial? Bagaimana kira-kira kalau pranata atau lembaga tersebut dihidupkan kembali? Hasil rencana ini kemudian dirumuskan dalam bentuk rencana kerja (*action plan*) baik yang berupa konservasi maupun revitalisasi. Bagi pranata atau lembaga yang masih berfungsi sudah sepatutnya tetap dipelihara agar tetap hidup dan kontributif. Untuk itu diperlukan berbagai kegiatan pelestarian. Sedangkan pranata yang sudah tidak berdaya dalam menghadapi perubahan sosial budaya yang cepat perlu dilihat kembali kemungkinan untuk memberdayakan, merevitalisasi atau mengkonstruksi ulang. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus, dimonitor dan dievaluasi setiap saat. Akhirnya masyarakat mengetahui telah terjadi perubahan, baik yang menyangkut konservasi maupun revitalisasi dengan semakin menguatnya kearifan budaya lokal atau diperkenalkannya kearifan budaya lokal baru.

Penutup

Dominasi sistem dunia terhadap sistem nasional maupun lokal menjadi tantangan tersendiri untuk *survive*. Sejarah menunjukkan bahwa sebuah imperium dunia tidak berdaya menghadapi musnah karena tidak berdaya menghadapi perubahan, sebagaimana Romawi, Mesir Kuno, Babilonia, dan kekhalifahan Islam. Di zaman modern kita melihat Uni Soviet dan Yugoslavia juga runtuh disebabkan ketidakberdayaan menghadapi penetrasi pasar. Berbeda dengan Bali, misalnya, wilayah ini semakin dikenal oleh dunia dikarenakan Masyarakat Bali tetap kukuh pada tradisi, nilai-nilai dan kebudayaan Bali. Namun, globalisasi yang mensyaratkan dihormatinya Hak Azasi Manusia dan Demokrasi, Bali juga harus menyikapinya dengan kearifan lokal, dan *local geniours*. Jika tidak maka, atas dasar kebebasan beragamaan kebebasan penyiaran agama, Bali di masa mendatang bisa berubah menjadi berbeda dengan bali yang sekarang. Hal tersebut sudah terjadi dengan Indonesia tercinta, *local wisdom* yang terkriskal dalam falasafah negara Pancasila semakin tidak populer digantikan dengan demonstrasi dan kebebasan berwacana. Rasanya kita sudah tidak lagi berada di Indonesia yang ramah, santun, berbudi, dan damai.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, *Integrasi Nasional, Globalisasi dan Kearifan Lokal, Antropologi Indonesia*, 2006.
- Anwar, Marzani, *Folklor dan Artinya Bagi Kearifan Lokal masyarakat Propinsi Jambi*, Jakarta: Badam Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2007.
- Basyuni, Muhammad Maftuh. *Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2006.
- Budiaman, dkk, *Folklor Betawi*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1979.
- Calchoon, Craig J., *The Anthropological Study of Education*, Paris: The Hague Mouton Publisher, 1976.
- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Dananjaja, James, *Folklor Indonesia*, Jakarta: PT Grafiti Press, 1986.
- Farida, Anik, *Belajar Mengelola Konflik Dengan Kearifan Lokal*, dalam *Jurnal Penamas*, vol xx No. 1 – Th. 2007, Badan Litbang, Departemen Agama, Jakarta, 2007.
- Geertz, Clifford, *Local Knowledge, Further Essays in Interpretative Anthropology*, New York: Basic Book Inc Publisher, 1983.
- , *Local Knowledge, Further Essays in Interpretative Anthropology*, New York: Basic Book Inc Publisher, 1983.
- , *The Interpretation of Culture*, New York: Basic Book. Inc Publisher, 1973.
- Herawati, Isni, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Using, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur*, Yogyakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, 2004.
- HM., Afif, *Pola Interaksi Sosial Etnik Melayu dan Jawa Di Kota Pekanbaru: Studi tentang Peran Agama dalam Proses Adaptasi Sosial*, (Jakarta: Badam Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2007.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI), 1987.
- Lauer, Robert H., *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Terj. Alimandan, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Malik, Ichsan dkk, *Belajar Mengelola Konflik*, Jakarta: Institut Titian Perdamaian, 2007.
- Moertop, Ali, *Strategi Pembangunan Indonesia*, Jakarta: CSIS, 1978.
- Moh. Zahid, *Hukum Adat Perkawinan Adat Lampung Pasca UU Perkawinan*, (Jakarta: Badam Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2007.
- Mulder, Niel, *Agama, Hidup Sehari-Hari dan Perubahan Budaya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Mumfanti, Titi, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah*, Yogyakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, 2004.

- Nababan, Abdou, *Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995.
- Peursen, Van, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1976.
- Rudy Harisyah Alam, *Kearifan Budaya Betawi dan Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2007.
- Rusmin Tumanggong, dkk (ed), *Konflik dan Modal Kedamaian Sosial dalam Konsepsi Kalangan Masyarakat di Tanah Air: Studi Penulurusan Idea di Kawasan Komunitas Krisis Integrasi Bangsa dalam Merambah Kebijaksanaan*, (Jakarta: Lemlit dan LPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Balitbangpos Departemen Sosial, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Sugiono, Muhadi, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Sukari, *Kearifan Budaya Lokal di Lingkungan Masyarakat Tengger, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur*, Yogyakarta: Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, 2004.
- Sumintarsih, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Madura*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005.
- Sunaryo, *Islam Indonesia: Negosiasi Tanpa Henti, Titik Temu*, Vol. 2. No. 1, Juli – Desember 2009. Mujiburrahman, *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Idiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya bangsa (Local Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Suparlan, Parsudi, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, Jurnal Antropologi Indonesia, 2002.
- Suyami, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Nelayan Jepara, Jawa Tengah*, Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2005.
- Tim FKUB Sumatera Utara, *Kerangka Acuan: "Dialog Urgensi Aktualisasi Pendidikan Multikultural dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama"*, Makalah disampaikan pada seminar Dialog Urgensi Aktualisasi Pendidikan Multikultural dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama di Medan, 17 Oktober 2009.
- Turmudi, Endang, *Kearifan lokal dan Problem Ortodoksi Agama*, Makalah disampaikan dalam seminar Pengembangan Kerukunan Bergama Melalui Revitalisasi Budaya dan

*Strategi Kebudayaan Pembangunan Keberagamaan di Indonesia:
Mempertegas Kontribusi Kearifan Budaya Lokal dalam Masyarakat Berbhinneka*

Keraifan Lokal Guna Membangun Kebudayaan Nasional, Badang Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 25 Agustus 2005.

Widiyanto, Bambang, dan Iwan Meulia Pirous, *Perspektif Budaya: Kumpulan Tulisan Koentjaraningrat Memorial Lectures I-V/2004-2009*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.